



Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Provinsi Bali

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan Sesanti Angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali ini diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja renstra.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan dari stakeholder untuk penyempurnaan dalam evaluasi Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Bali



Dr. I Wayan Sunada, SP., M. Agb
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 198703 1 056

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	10
2.1 Gambaran pelayanan	10
2.2 Kinerja pelayanan perangkat daerah.....	16
2.3 Kelompok sasaran layanan	21
2.4 Permasalahan dan isu strategis	31
2.5 Penentuan isu strategis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan	42
3.2 Sasaran	44
3.3 Strategi	45
3.4 Arah kebijakan	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN DAN PANGAN	48
4.1 Program, kegiatan, dan sub kegiatan	48
4.2 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian dan pangan	53
BAB V PENUTUP	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	13
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Berdasarkan tingkat pendidikan	13
Tabel 2.4 Prasarana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.....	14
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	16
Tabel 2.6 Kelompok sasaran penerima layanan	21
Tabel 2.7 Masalah pokok. Masalah, dan akar masalah	31
Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran serta Target Kinerja 5 Tahun Renstra	44
Tabel 3.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029	33
Tabel 3.3 Sasaran Renstra 2025 – 2029	33
Tabel 4.1 Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Renstra 2025 – 2029	54
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	55
Tabel 4.3 Capaian realisasi tahun 2024	55
Tabel 4.4 Komoditas Sektor pertanian	56
Tabel 4.5 Capaian kinerja tahun 2024 terhadap Kinerja (akhir renstra) untuk semua sasaran	59
Tabel 4.6 Realisasi Indeks Penanaman (IP) Tahun 2024.....	60
Tabel 4.7 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi	61
Tabel 4.8 Realisasi Eksport Produk Pertanian Tahun 2024.....	63
Tabel 4.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	63



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka seluruh elemen penyelenggara negara /pengelola pemerintahan wajib melakukan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*), serta didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif.

Seiring dinamika perubahan regulasi yang terjadi, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara paralel terus berproses. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di daerah, tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mempedomani seluruh rangkaian proses sistem perencanaan di daerah.

Dengan telah disusunnya dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sesuai mekanisme yang berlaku, evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis pada perangkat daerah juga terus berproses sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali periode 2025-2029, perlu memperhatikan : 1) Isu-isu strategis terkini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD; 2) perlu menyesuaikan nama program strategis dengan bidang yang menangani serta kewenangan sehingga indikator kinerjanya jelas; 3) perlu dilakukan penyempurnaan indikator kinerja sehingga ada perbedaan yang jelas antara indikator kinerja utama, indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kegiatan (*output*); 4) Perlu penyesuaian pencapaian target indikator sampai akhir masa renstra dengan memperhatikan indikasi pendanaan sesuai yang tertuang dalam rancangan awal perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. 5) perlu dilakukan penyempurnaan dokumen perencanaan strategis (Renstra) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang disusun berdasarkan hasil forum renstra yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali oleh tim penyusun renstra. Renstra merupakan pedoman, alat kendali dan tolak ukur bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2025 - 2029.

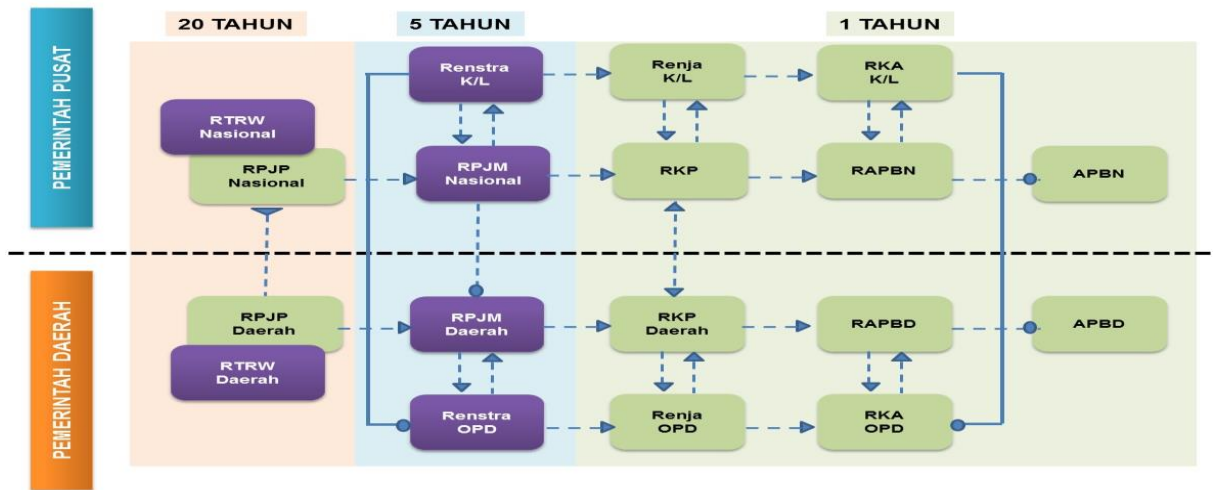


Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 sangat erat, mengingat Rencana Strategis merupakan dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Semesta Berencana tahun 2025-2029 yang memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah (PD), Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dengan memuat rencana program strategis dan program pendukung 5 (lima) tahunan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif. Dibawah ini adalah diagram alur keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana tampak dalam Gambar keterkaitan antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen RPJMD
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi karena dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki, dan menentukan tindak lanjut yang tepat. Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447, 2019);
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016



- Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
 13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud Dan Tujuan.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan dan Sub kegiatan agar selaras dengan visi, misi, serta tujuan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan selama periode lima tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali setiap tahunnya.

3. Menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. Menjadi instrumen untuk mengukur kinerja perangkat daerah melalui indikator tujuan dan sasaran yang terukur.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah OPD, Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

- 2.1 Gambaran pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan isu strategis

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan



Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanian Dan Pangan, menguraikan : tentang strategis arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah.

Bab V : Penutup





BAB II
**GABARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

2.1. Gambaran Pelayanan Umum

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

a. Tugas Pokok

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan bidang pangan;



- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang Pertanian dan bidang Pangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, terdiri atas:

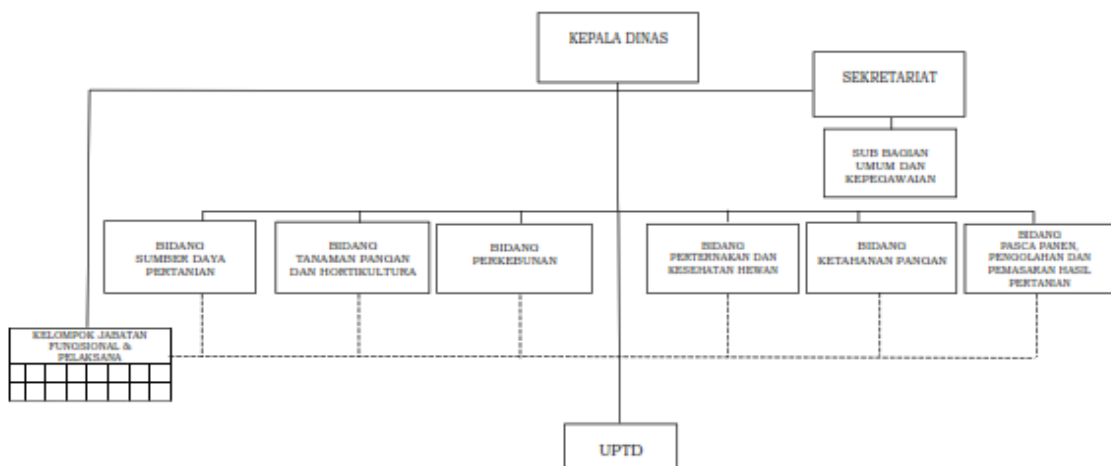
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Kasubag Umum dan kepegawaian
- c. Bidang Sumber Daya Pertanian
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e. Bidang Perkebunan
- f. Bidang Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan
- h. Bidang Ketahanan Pangan
- i. UPTD Dinas :
 - a. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
 - c. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
 - e. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibibitan dan Hijauan Pakan Ternak
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25



Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Bali



2.1.3 Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Honorer (Non-ASN). Sumber daya manusia tersebut bertugas pada Dinas Induk, dan 5 UPTD yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.



Tabel 2.1
Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali berdasarkan
Jenjang Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Orang	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	1	0
2	Administrator	11	4	7
3	Pengawas	15	7	8
4	Fungsional	96	35	61
5	Pelaksana	384	250	134
6	Honoror	96	76	20
Jumlah		603	373	230

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali
berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	IV	30
2	III	156
3	II	17
4	I	0
5	PPPK (V)	26
6	PPPK (VII)	6
7	PPPK (IX)	272
Jumlah		507

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali
berdasarkan tingkat pendidikan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	SMA	69
2	D1/D2	0
3	D3	8
4	S1/D4	393
5	S2	35
6	S3	2
Jumlah		507

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025



2.1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan 5 (lima) UPTD masing-masing memiliki gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran yang memadai.

Tabel 2.4

Prasarana yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

No	Prasarana	Ketersediaan		
		Jumlah	Unit	Kondisi
1	Tanah	46	Unit	Lengkap
2	Gedung	18	Unit	baik
3	Meja dan Kursi Pimpinan	3	Unit	baik
4	Meja dan Kursi Staf	200	Unit	baik
5	Meja dan Kursi Tamu	6	Unit	baik
6	Meja Rapat	56	Unit	baik
7	Kursi Rapat	151	Unit	baik
8	Lemari Besi	5	Unit	baik
9	Lemari Kayu	4	Unit	baik
10	Rak Buku	8	Unit	baik
11	Filling Cabinet	33	Unit	baik
12	Mesin Absensi	14	Unit	baik
13	Telepon	3	Unit	baik
14	Faximile	2	Unit	baik
15	LAN	2	paket internet	baik
16	Tablet	1	Unit	baik
17	UPS	4	Unit	rusak berat
18	Handycam	1	Unit	baik
19	Kamera Digital	3	Unit	baik
20	Video Conference	1	Unit	baik
21	CCTV	30	Unit	baik
22	TV	3	Unit	baik
23	Bracket Standing	2	Unit	baik
24	AC Split	98	Unit	baik
25	Personal Computer	67	Unit	baik
26	Notebook / Laptop	68	Unit	baik



No	Prasarana	Ketersediaan		
		Jumlah	Unit	Kondisi
27	Printer	63	Unit	baik
28	Scanner	4	Unit	baik
29	Projector	5	Unit	baik
30	Layar Projector	2	Unit	baik
31	Sound System	7	Unit	baik
32	Whiteboard	5	Unit	baik
33	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	15	Unit	baik
34	Lemari Es	2	Unit	baik

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025



2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah adalah ukuran atau gambaran mengenai sejauh mana suatu layanan yang ada pada instansi pemerintahan daerah mampu memberikan layanan publik secara efektif, efisien, responsif, dan akuntabel sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Tabel 2.5

Capaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Capaian Kinerja										Keterangan	
				Target					Realisasi						
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Persentase Kabupaten/ Kota dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diatas 80,00	%		70	80					70	84.54				IKU Thn 2020 DAN 2021
2	Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (%)	%				1	1				1.61	4.42		IKU 2022 DAN 2023	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Capaian Kinerja										Keterangan
				Target					Realisasi					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	%		0.4					0.373					IKU Thn 2020
4	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan (ton)	ton			843,622					786,101				IKU Thn 2021
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	%				1	1				6.05	0.23		IKU 2022 DAN 2023
6	Persentase peningkatan produksi hortikultura (%)	%		0.4					0.45					IKU Thn 2020
7	Jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)	ton			101,309					115,970				IKU Thn 2021



No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Capaian Kinerja										Keterangan	
				Target					Realisasi						
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Persentase peningkatan produksi perkebunan (%)	%		0.4					0.403						IKU Thn 2020
9	Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	ton			95,119					94,109					IKU Thn 2021
10	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (%)	%				1	1				-1.58	0.07			IKU 2022 DAN 2023
11	Jumlah Populasi Ternak Lokal Bali (Ternak)	ternak		446,893	455,830				383,836	584,462					IKU Thn 2020 DAN 2021
12	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	%		29	31				29	31					IKU Thn 2020 DAN 2021
13	Nilai Tukar Petani (NTP)	%		104.5	105				93.56	93.4					IKU Thn 2020 DAN 2021



No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Capaian Kinerja										Keterangan
				Target					Realisasi					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	%		2	2				2	2				IKU Thn 2020 DAN 2021
15	Jumlah kasus sakit hewan menular strategis dan zoonosis (kasus rabies dan flu burung)	kasus		150	100				100	221				IKU Thn 2020 DAN 2021
				5	4				0	0			IKU Thn 2020 DAN 2021	
17	Persentase Pertumbuhan Volume Pemasaran Komoditas Pertanian (%)	%				1	1				-3.56	50.55		IKU 2022 DAN 2023
18	Persentase ketersediaan pangan strategis	%	100					100					193	IKU 2024



No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Capaian Kinerja										Keterangan	
				Target					Realisasi						
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	10.62					10.62						13.17	IKU 2024



2.3 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan penerima layanan sesuai kriteria peraturan yang ada dalam menjalankan aktifitas pelayanan perangkat daerah.

Tabel 2.6

Kelompok sasaran penerima layanan pada dinas pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Bali tahun 2020 s.d. 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan							Keterangan		
				Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	v							Kelompok Tani/Masyarakat
.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			v	v				Aparatur, kelompok masyarakat



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan							Keterangan		
				Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		
			Provinsi dan Kabupaten/Kota										
		1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			v	v				Aparatur dan 29 Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0009	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			v	v				Aparatur, kelompok masyarakat
				0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan		v	v				v	Pelaku Usaha Pertanian Organik dan Pelaku Usaha PSAT



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan						Keterangan				
				Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa		Dunia Usaha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15			
			0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		v	v				v	Pelaku Usaha Pertanian Organik dan Pelaku Usaha PSAT		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				v			Aparatur		
				0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				v				Aparatur	
		1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					v			Aparatur	
				0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					v				Aparatur
		1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						v			Aparatur
				0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						v			Aparatur
				0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						v			Aparatur
				0008	Fasilitasi Kunjungan						v			Aparatur



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan							Keterangan	
				Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
			Tamu									
			0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				v					Aparatur
		1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				v					Aparatur
			0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				v					Aparatur
		1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				v					Aparatur
			0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				v					Aparatur
			0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				v					Aparatur



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan						Keterangan			
				Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangakat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa		Dunia Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		v	v					Kios Pengecer dan Kelompok Tani.
			1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		v	v	v			v
		0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		v	v	v			v	Kelompok Tani / Subak, Petani, Penangkar, BBP/BBU
		0007			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang		v	v	v			v	Petani, Penangkar, BBP/BBU
		0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji		v	v	v			v	Petani, Penangkar, BBP/BBU		
				0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		v	v	v			v	Petani, Penangkar, BBP/BBU



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan								Keterangan
				Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
			0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi		v	v	v			v	Petani, Penangkar, BBP/BBU
		1.03	0004	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		v	v	v				Masyarakat, Pemda
		1.04	0001	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		v	v					Kelompok Tani Ternak



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan						Keterangan		
				Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa		Dunia Usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
		Provinsi	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		v	v				v	Aparatur
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.01	Penataan Prasarana Pertanian	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		v	v	v			Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara
				0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		v	v	v			Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan							Keterangan		
				Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangakat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	v	v	v					Masyarakat Umum
		1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit		v	v				v	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha
				0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		v	v				v	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha



No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran Penerima Layanan						Keterangan	
						Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa		Dunia Usaha
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	15
		1.05	Kesejahteraan Hewan	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya		v	v					RPH(Rumah Potong Hewan) / TPH (Tempat Potong Hewan)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	0006	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		v	v					Kelompok Tani/ Subak
				0008	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		v	v					Kelompok Tani/ Subak



No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan							Keterangan	
					Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha		
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	15
				0009	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		v	v					Kelompok Tani/ Subak
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.02	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		v	v					Kelompok Tani



2.4 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

2.4.1 Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Bali sebagai berikut ;

Tabel 2.7
Penentuan Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Produktivitas Pertanian belum optimal	Ketahanan Pangan belum optimal	Produksi Tanaman Pangan belum optimal
			Produksi Hortikultura belum optimal
			Produksi Komoditas Peternakan belum optimal
			Produksi Komoditas Perkebunan belum optimal
			Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis belum terkendali
			Masih adanya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
			Terbatasnya sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur dan alat mesin pertanian



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kebutuhan Pangan Daerah Belum Optimal	Ketahanan Pangan belum optimal	Masih minimnya infrastruktur pendukung cadangan pangan Masih adanya cemaran dari produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan Belum semua produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan tersertifikasi



a. Lahan pertanian dan ketahanan pangan

Alih fungsi lahan pertanian cenderung berkurang setiap tahun karena beralih fungsi ke non pertanian/alih fungsi lahan menjadi daerah pemukiman dll, penurunan luas lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Bali tahun 2018 s/d 2024 rata-rata mencapai 1.348,35 Ha atau 1,77 % per tahun, kebanyakan petani di Bali (54,81%) mengusahakan lahan sawah dibawah 0,50 ha dan cenderung berkurang karena adanya proses fragmentasi lahan sebagai akibat dari system/pola warisan, kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun.

b. Sarana dan prasarana produksi

Sarana prasarana belum optimalnya penyediaan alat dan mesin (Alsin) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan beserta penyediaan pupuk bersubsidi, pemakaian benih/bibit bermutu belum optimal dan ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau) disamping itu juga terjadi kopetensi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tangga dan bisnis).

c. Pemanfaatan permodalan usaha belum optimal

Kelompok tani belum optimal memanfaatkan permodalan karena terbatasnya kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan, baik berupa kredit program maupun kredit komersial dari Bank dan lembaga keuangan lainnya masih rendah, sehingga usaha industri pengolahan produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontiyuitasnya.

d. Daya saing produk hasil pertanian dan ketahanan pangan

Pemasaran produk pertanian dan ketahanan pangan di pasar tradisional maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para



pembeli/konsumen (buyer market). Hal ini mengakibatkan harga jual produk pertanian dan ketahanan pangan seringkali kurang menguntungkan produsen (petani). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk pertanian dan ketahanan pangan masih lemah, yaitu (1). Masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguatan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (preference) para konsumen. (2). Belum memadainya sarana dan prasarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi produk pertanian dan ketahanan pangan dari petani ke unit pengolahan atau ke pedagang.

e. Sumber daya petani

Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan dari segi kelembagaan petani belum optimal, sebagai kelembagaan petani belum berperan secara optimal terutama dalam aspek ekonomi, kualitas SDM petani relatif rendah dan kurangnya pelatihan atau diklat teknis.

f. Permasalahan di sektor peternakan

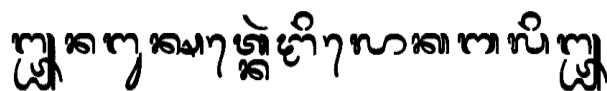
Lambannya peningkatan produksi dan produktivitas ternak karena komoditas perternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Penguasaan teknologi di bidang peternakan masih rendah, baik teknologi budidaya, pakan ternak dan penerapan Kawin Suntik (Inseminasi Buatan-IB), teknologi pengelolaan pakan ternak, teknologi sistem informasi kesehatan hewan nasional (SIKHNAS), teknologi pendeteksian dan pengamatan penyakit secara dini, teknologi pengujian/identifikasi melalui laboratorium veteriner juga masih rendah. Kondisi Industri hilir peternakan masih sangat terbatas, padahal nilai



tambah pada produk olahan ini sangatlah besar, industri hilir peternakan baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Untuk itu, perlu dukungan dari kegiatan budidaya peternakan dan kesehatan ternak (sektor hulu). Pemeliharaan ternak di Provinsi Bali yang sebagian besar hanya sebagai usaha sampingan dan dipelihara secara non intensif/semi intensif sehingga tidak memberikan pendapatan yang optimal. Disamping itu tidak adanya perencanaan pemasaran hasil secara periodik, menyebabkan peran hasil penjualan ternak dalam ekonomi keluarga masih bersifat mengatasi kebutuhan mendesak. Pemanfaatan sumber daya pengembangan (lahan sebagai basis penyedia pakan dan budidaya) belum optimal dan pengendalian penyakit hewan menular belum optimal.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Bali yaitu :



”Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

**Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
dalam Bali era Baru**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mendukung misi ke 12 yaitu ”Terwujudnya Ketahanan Pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan serta terpenuhinya kebutuhan sandang, papan kehidupan krama Bali”. Dengan mengampu Tujuan 3 : Meningkatkan Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali dan sasaran 1: Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan Dengan 2 Sasaran yaitu: Sasaran 1: Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali dengan indikator indeks ketahanan pangan.



2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025 adalah ” *Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”.

Kementerian Pertanian mendukung terwujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

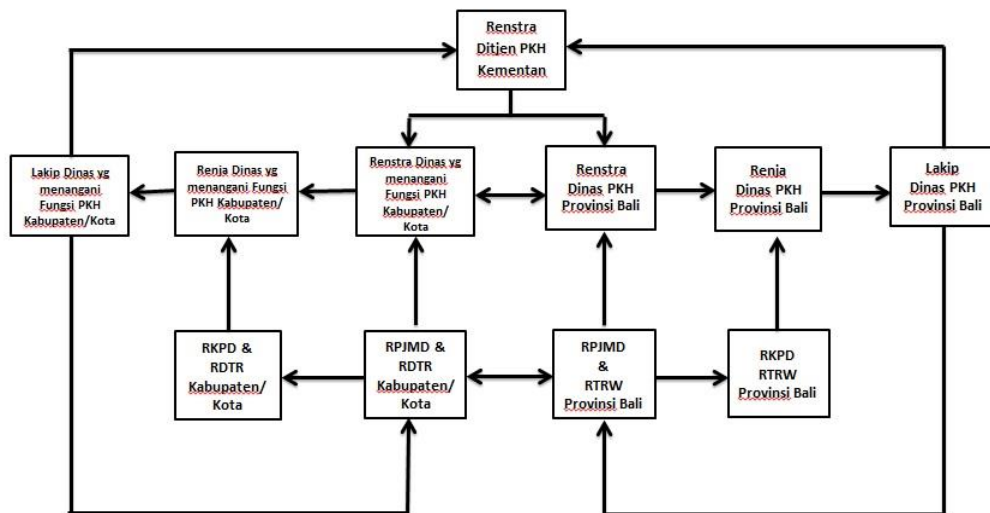
Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian dan ketahanan pangan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penguatan permodalan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan (pertanian organik). dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan



kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Dibawah ini adalah diagram alur keterkaitan antara Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, Provinsi / Kabupaten / Kota.

Gambar 2.1
Diagram Alur Keterkaitan antara Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Provinsi/Kabupaten/Kota



Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur Bali sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.



2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan rencana pembangunan kawasan budidaya mengacu rencana pola ruang wilayah Provinsi Bali bahwa untuk komponen kawasan budidaya yang dapat dipetakan dan dihitung seluas 388.089 atau 68.9% dari luas wilayah Provinsi Bali, sedangkan rencana kawasan peruntukan pertanian seluas 298.214 ha atau 52,9% dari luas daerah Provinsi Bali.

Untuk pengelolaan kawasan budidaya pertanian dan ketahanan pangan telah memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis yang pelaksanaannya meliputi :

1. Pemanfaatan lahan secara optimal baik lahan basah (Subak) atau lahan kering (Subak Abian) dan pemanfaatan lahan peternakan,
2. Pemanfaatan lahan kritis sesuai dengan pengolahan tanah yang ramah lingkungan ,
3. Pemanfaatan ruang peruntukan karena alih fungsi lahan pertanian dan ketahanan pangan, dan Pemanfaatan lahan pekarangan skala rumah tangga.

2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dituntut lebih kreatif dan berinovasi dalam menghadapi Pasar Global dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi di sektor pertanian dan ketahanan pangan baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keragaman produk baik ditingkat Pasar Tradisional maupun ditingkat Pasar Nasional maupun Pasar Internasional.

Untuk mendukung pembangunan Daerah melalui penyelenggaraan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditas pertanian dan ketahanan pangan dan jaminan keamanan suasebada pangan pertanian dan



ketahanan pangan beserta hasil produk pertanian dan ketahanan pangan, serta menjaga keamanan pangan hasil pertanian maka dari itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagai berikut *“Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian dan Ketahanan Pangan”* yang diakibatkan ;

1. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian dan ketahanan pangan;
2. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan, degradasi lahan;
3. Belum optimalnya infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan;
4. Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan ketahanan pangan terhadap produk impor;
5. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
6. Belum optimalnya kelembagaan petani/peternak;
7. Reaktif terbatasnya tingkat pendidikan petani/peternak.

2.5.1 Permasalahan :

Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi saja, namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan di dalam negeri serta hubungan antar negara. Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi



serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Berdasarkan identifikasi masalah sektor Pertanian dan pangan di Provinsi Bali diantaranya :

1. Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana-prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana Alam
2. Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan
3. Kesadaran masyarakat dan kalangan pelaku usaha tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan yang terregister masih rendah
4. Pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal
5. Penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah belum optimal
6. Penerapan usaha pertanian konvensional, sebagian besar bersifat subsisten dan kurang inovatif seperti kecenderungan untuk menggunakan input pupuk kimia secara terus menerus, jangan menggunakan rotasi tanaman, kehilangan pasca panen masih tinggi dan menggunakan air irigasi yang tidak efisien

2.5.2. Isu Strategis


Berdasarkan permasalahan yang berkembang perlu dilakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis untuk mendapatkan perhatian dan upaya pemecahan masalah. Secara umum isu strategis pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Bali antara lain:

1. Kecukupan dan kualitas konsumsi pangan belum optimal
2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih tinggi dan cenderung meningkat serta tidak merata di kabupaten/kota




3. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan masih rendah
4. Nilai Tambah Pertanian terhadap jumlah tenaga kerja masih rendah yang menunjukkan produktivitas sektor pertanian masih rendah
5. Sebagian besar kabupaten/kota belum menetapkan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan.





BAB III
TUJUAN, SARANA ,
STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan memiliki keterkaitan dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan sektor Pertanian dan Pangan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

3.1. Tujuan Renstra Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Bali Tahun 2025-2029

Penyusunan Tujuan dan sasaran pembangunan sektor Pertanian dan Pangan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Visi : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru” yang bermakna; Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala – Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam Memantapkan



dan mempercepat pewujudan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dalam Bali Era Baru dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) Misi dimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mendukung pencapaian **Misi 12 yaitu Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali** dan 6 Bidang Prioritas Pembangunan yaitu :

- Bidang 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal
- Bidang 2. : Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Bidang 3. : Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata.
- Bidang 4. : Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi.
- Bidang 5. : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.
- Bidang 6. : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mendukung pencapaian Bidang 3 yaitu Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata.



Tabel 3.1

Tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD
Misi 12 : Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali.	Meningkatnya Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali.	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan dan kesejahteraan petani

3.2. Sasaran Renstra Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi menggambarkan tercapainya tujuan dalam bentuk hasil pembangunan organisasi Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan Tujuan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di rumuskanlah sasaran strategis jangka menengah beserta Indikator Kinerja dan Target Kinerja.



Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	Meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan dan kesejahteraan petani	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis	Persentase ketersediaan pangan strategis	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya nilai produk olahan pertanian	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50

3.3. Strategi Renstra Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Strategi ini berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah, serta meningkatkan daya saing Provinsi Bali dalam konteks pembangunan pertanian di Provinsi Bali.



Tabel 3.3
Strategi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan dan kesejahteraan petani	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis	Mendorong peningkatan produktivitas pertanian	Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan lahan sawah
		Diversifikasi dan optimalisasi pertanian	Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna
	Meningkatnya nilai produk olahan pertanian	Peningkatan kualitas/kwantitas hasil pertanian Krama Bali	Mempercepat hilirisasi hasil pertanian

Adapun strategi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas/kwantitas hasil pertanian Krama Bali
2. Meningkatkan diversifikasi dan optimalisasi
3. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian Krama Bali
4. Meningkatkan ketahanan pangan bagi Krama Bali
5. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman strategis yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan program pembangunan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun



2025-2029. Arah kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menuntaskan sistem pertanian organik/ pertanian ramah lingkungan
2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian
3. Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan melarang alih fungsi lahan sawah
4. Mempercepat hilirisasi hasil pertanian
5. Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna





BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN**

PENYELENGGARAAN

**BIDANG URUSAN PERTANIAN
DAN PANGAN**



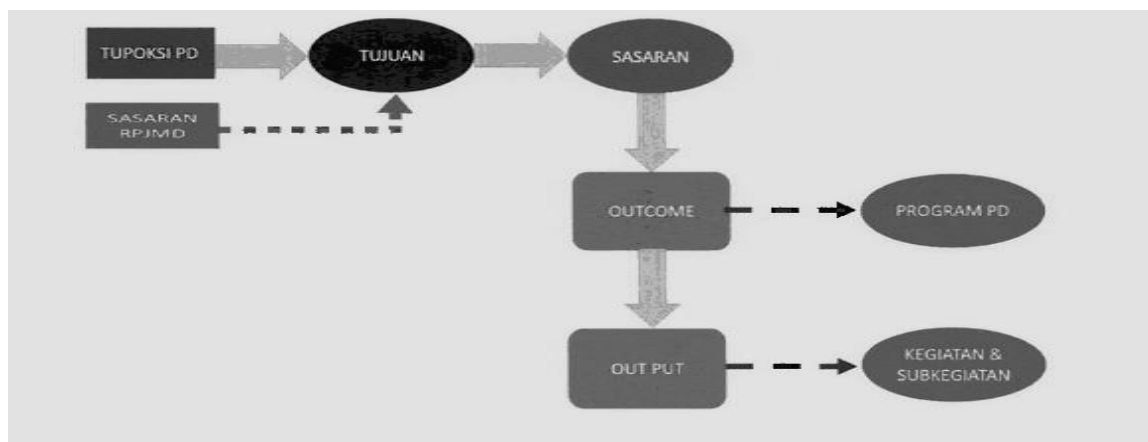
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN DAN PANGAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagai perwujudan tindak lanjut dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Dengan demikian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melaksanakan beberapa program dan kegiatan dan lebih lanjut dijabarkan dengan beberapa sub kegiatan serta pendanaannya sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.



Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan, dan memperhatikan indikator program prioritas dan pagu anggaran indikatif, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan melaksanakan Program/Kegiatan dalam kurun 5 (lima) tahun 2025-2029 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1.1 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

2. Program peningkatan Diversifikasi dan Katahanan Pangan Masyarakat

2.1 Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

2.1.3 Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi



3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- 3.1 Penyusunan Peta Keentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 3.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan provinsi
 - 3.2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 3.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- 4.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

B URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi



- Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.2.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.2.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.2.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.3 Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.4.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.4.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 2.1 Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- 2.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
- 2.2 Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- 2.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan
- 2.2.2 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura



- 2.2.3 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
- 2.3 Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/bibit Ternak dan Tanaman pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta pakan Kewenangan Provinsi
- 2.3.1 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 3.1 Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
- 3.1.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- 3.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 3.1.3 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner

- 4.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 4.1.1 Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 4.2 Kegiatan Kesejahteraan Hewan
- 4.2.1 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya



5. Program Penyuluhan Pertanian

5.1 Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

6. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

6.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

6.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

6.1.2 Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

6.1.3 Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Dengan indikator program prioritas, pagu anggaran indikatif dan target percepatan program selama 5 (lima) tahun disampaikan pada tabel 4.1. dalam lampiran

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanian Dan Pangan

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 maka disusunlah rencana strategis arah dan kebijakan perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dalam rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 turut berperan dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Tujuan 1 (T1) yaitu : menurunkan tingkat kemiskinan krama Bali dengan sasaran 1 (S1.1) yaitu: meningkatnya perekonomian Krama Bali



dan sasaran 4 (S1.4) yaitu terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Renstra 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE			KONDISI AKHIR	
					2024	2025	2026		
MISI 12	T3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali							
Indikator Tujuan	:	Angka Kemiskinan		Persen	4,72	4,07	4,06	3,97	3,97
Sasaran Pemerintah Daerah	S1.1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,47	5,75	5,75	5,85	5,85
		Meningkatnya Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	10,61	10,62	10,63	10,64	10,65
Sasaran Pemerintah Daerah	S1.4	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	Angka inflasi	Persen	2,07	3±1	3±1	3±1	3±1
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis	Persentase ketersediaan pangan strategis	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2024 - 2026

4.2.1. IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

IKU (Indikator Kinerja Utama) merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu instansi utama dalam mencapai tujuan dan sasaran.



Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Kinerja Utama Atau Tujuan/ Sasaran Strategi/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula	Target Kinerja			Penanggung jawab	Sumber Data	Ket
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis	Produksi + stok + barang masuk/ keluar	100	100	100	Bidang TPH, SDP, Ketahanan Pangan, Peternakan, UPTD BBI TPHBUN, BPTPHBUN, BIBDPHTPT	Data Statistik Pertanian	
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB	10,62	10,63	10,64	Bidang Perkebunan, PPPHP, UPTD BBI TPHBUN, BPTPHBUN, BPSB TPHBUN, BSMKP	BPS	

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024

4.2.2. Capaian Realisasi Tahun 2024 terhadap Realisasi Tahun 2023

Tabel 4.3 Capaian realisasi tahun 2024 terhadap realisasi tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2023	2024	2023	2024
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis	100%	100%	-47,17%	193,00%
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	25%	10,62%	13,73%	13,17%

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun dan BPS 2024



4.2.3. Analisa Capaian Kinerja Antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023

A. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Startegis

Tabel 4.4 komoditas sektor pertanian

Tahun 2023

No	Komoditas	Stok Awal	Produksi	Impor	Ekspor	Ketersediaan (ton)
1	Beras	0	421,729	39	-	421,768
2	Jagung Pipilan Kering	0	56,274	2	-	56,276
3	Bawang Merah	0	35,374	-	-	35,374
4	Bawang Putih	0	167	2	-	169
5	Cabai Rawit	0	20,523	-	-	20,523
6	Cabai Besar	0	7,083	2	-	7,085
7	Daging Sapi/Kerbau	0	4,780	-	-	4,780
8	Daging Ayam Ras	0	96,526	2	-	96,528
9	Telur Ayam Ras	0	226,185	670	-	226,855

Tahun 2024

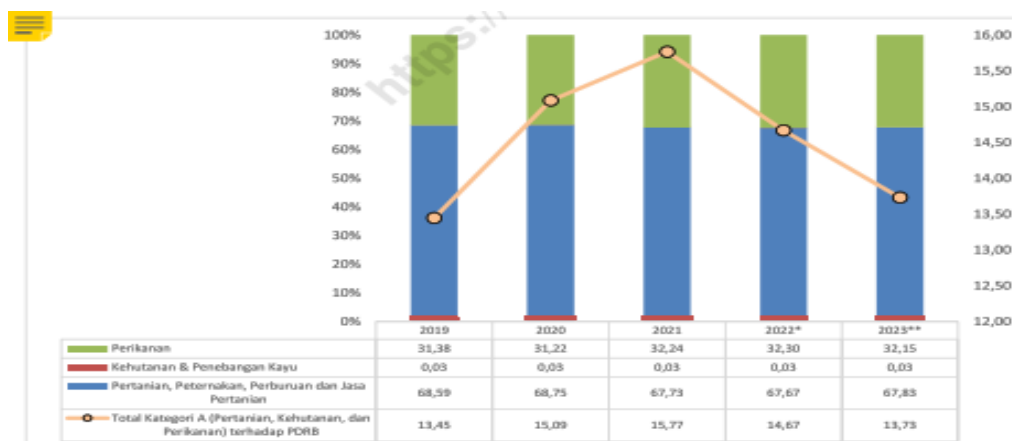
No	KOMODITAS	Ketersediaan (Ton)				Total Ketersediaan (Ton)
		Stok	Produksi	Impor	Ekspor	
1	BERAS	817,281	447,682	34,620	0	1,299,583
2	JAGUNG	12,174	68,806	107	0	82,458
3	CABAI BESAR	13,555	5,848	519	0	19,368
4	CABAI RAWIT	14,611	19,706	629	0	35,535
5	BAWANG MERAH	21,328	33,560	918	0	55,007
6	BAWANG PUTIH	26,830	122	916	0	27,865
7	DAGING SAPI	5,886	221	564	0	6,671
8	DAGING AYAM RAS	52,214	1,789	2,531	0	56,534
9	DAGING BABI	23,991	2,836	1,048	0	27,875
10	TELUR AYAM	44,167	20,086	2,279	0	66,532



Dari data di atas dapat disimpulkan ketersediaan pangan utama pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan pada komoditi beras, bawang merah, cabe rawit, daging sapi hal ini disebabkan oleh meningkatnya produksi pada masing – masing komoditi tersebut selain itu adanya impor masuk juga mempengaruhi ketersediaan bahan pangan pokok pada tahun 2024, dibandingkan tahun 2023 yang mana produksi beras, bawang merah mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh anomali iklim yang berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas komoditi tersebut, selain itu pemulihan dari pandemi PMK yang menyerang ternak sapi pada kurung waktu tahun 2021 hingga 2022 juga mempengaruhi ketersediaan daging sapi pada tahun 2023.

B. Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB

Grafik 1 : Grafik PDRB Tahun 2024



Gambar 4.1 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) di Provinsi Bali (Persen), 2019–2023

Figure 4.1 Share of Subcategories to Value Added of Category A (Agriculture, Forestry, and Fishery) in Bali Province (Percent), 2019–2023

Sumber data : Data BPS 2024

Dari data yang tersaji di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan PDRB pada sektor pertanian pada tahun 2023 sebesar 13,73% hal ini disebabkan Pada tahun 2023, kontribusi kategori ini tercatat sebesar 13,73 persen, turun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 14,67 persen Penurunan kontribusi tersebut menempatkan Kategori A (Pertanian,



Kehutanan dan Perikanan) semakin jauh dengan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebagai kontributor utama. Pada tahun 2023, selisih kontribusi antara kedua kategori tersebut sebesar 6,20 persen. Padahal pada tahun 2021 (pada saat pandemi Covid-19), selisih kontribusinya hanya sebesar 0,83 persen. Semakin meningkatnya aktivitas pariwisata di Bali diduga menyebabkan kembali beralihnya aktivitas ekonomi dari sektor pertanian ke sektor pariwisata sehingga berdampak pada semakin menurunnya kontribusi Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan). Nilai tambah yang tercipta dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) tercatat sebesar 37,68 triliun rupiah pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 35,99 triliun rupiah. Apabila dilihat struktur subkategori yang menyumbang nilai tambah pada Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) selama tahun 2019-2023 relatif tidak terjadi perubahan komposisi. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dengan rata-rata sebesar 68,12 persen sepanjang periode tahun 2019-2023. Apabila dirinci lagi, rata-rata sumbangan tertinggi dari subkategori ini bersumber dari golongan Peternakan yang mencapai 47,62 persen, diikuti golongan Tanaman Hortikultura yang menyumbang 19,10 persen dan golongan Tanaman Pangan sebesar 16,41 persen. Kontribusi cukup besar juga berasal dari golongan Tanaman Perkebunan yaitu sebesar 14,72 persen. Sedangkan, golongan Jasa Pertanian dan Perburuan sebagai aktivitas penunjang dari Subkategori Pertanian, Peternakan dan Perburuan hanya berkontribusi sebesar 2,15 persen



4.2.4 Capaian kinerja tahun 2024 terhadap Target Kinerja Renstra dari masing-masing sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Capaian kinerja tahun 2024 terhadap Kinerja (akhir renstra) untuk semua sasaran

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target akhir tahun renstra 2024	Capaian s/d 2026 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian Kerja (%)		
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis	%	100%	193.00%	193.00%	100,00	92,00%
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	10,62%	13,17%	124,01%	10,64	123,77%

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2024 dan BPS

dari tabel diatas dapat disimpulkan ketersediaan bahan pangan pokok mengalami surplus pada tahun 2024 dengan realisasi 193% atau 1.677.428 ton dari total kebutuhan 536.560 ton hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi beberapa komoditas antara lain beras, bawang merah, cabe rawit dan daging sapi, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya produktivitas tanaman padi, bawang merah, cabe rawit, peningkatan produktivitas pada tanaman padi dilakukan dengan melakukan program PAT atau perluasan areal tanam serta menintesisifkan penggunaan lahan selain itu penggunaan bibit, pupuk yang berkualitas juga memberikan outcome yang positif terhadap peningkatan produksi dan produktivitas disamping penggunaan teknologi

dalam hal budidaya,meningktanya populasi ternak sapi akibat berhasilnya pengendalian wabah penyakit PMK yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.



PDRB dapat dihitung dengan 3 pendekatan yaitu produksi, pengeluaran dan pendapatan. Pada praktiknya, PDRB sampai saat ini hanya dihitung dengan pendekatan produksi dan pengeluaran karena terkait dengan sumber data yang tersedia, pada indikator kontribusi PDRB pada sector pertanian mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, berkorelasi positif dengan estimasi realisasi sampai dengan akhir periode renstra sekitar 123,77%, akan tetapi mengalami penurunan terhadap realisasi PDRB atas harga berlaku menurut lapang usaha pada triwulan III sebesar 9.984.260,92 dibandingkan pada triwulan II sebesar 10.100.144,08 aktivitas ekonomi pada sektor pertanian juga cenderung melemah pada Triwulan III-2024 karena umumnya merupakan masa jeda antara musim panen utama dan musim tanam.

4.2.5 Realisasi Indeks Penanaman (IP)

Indek Pertanaman (IP) merupakan indikator yang dipakai untuk menunjukkan frekuensi pemnafaatan lahan sawah untuk ditanami tanaman semusim misalnya padi. IP dapat dipakai sebagai indikator efisiensi penggunaan sumber daya pertanian, karena semakin efisien penggunaan lahan, air dan prasarana produksi (alat dan mesin pertanian) maka IP akan semakin besar. IP padi pada lahan sawah pada tahun 2024 dengan capaian 185%.

Tabel 4.6 Realisasi Indeks Penanaman (IP) Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Update SP LBS 2024 Tgl 17 Jan 2025	Ralisasi Tanam 2024	IP %
1	Jembrana	6,519	10,297	158
2	Tabanan	19,381	35,277	182
3	Badung	8,689	17,171	198
4	Gianyar	10,847	23,124	213
5	Klungkung	3,718	4,957	133
6	Bangli	2,137	4,091	191



7	Karangasem	7,184	11,258	157
8	Buleleng	8,015	17,082	213
9	Denpasar	1,658	2,967	179
Bali		68,148	126,224	185

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024

4.2.6 Capaian Produktivitas Padi Sawah Bali dibandingkan Produktivitas Nasional Tahun 2024

Perbandingan produktivitas padi sawah di Bali sebesar 60,54 Ku/Ha lebih besar dibandingkan rata – rata produktivitas nasional hanya sebesar 52,42 Ku/Ha hal ini disebabkan oleh penerapan inovasi teknologi budidaya dalam penanaman padi, penggunaan benih yang bersertifikat. Rata – rata Produktivitas Padi secara nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi

No	Nama Provinsi	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
		2024	2024	2024
1	ACEH	301081.97	54.58	1643355.07
2	SUMATERA UTARA	419089.12	51.4	2154117.08
3	SUMATERA BARAT	296215.93	45.64	1352048.77
4	RIAU	57003.35	39.62	225836.5
5	JAMBI	64119.24	45.44	291367.31
6	SUMATERA SELATAN	521251.99	54.53	2842559.41
7	BENGKULU	56868.57	47.86	272177.1
8	LAMPUNG	531435.03	51.37	2729901.42
9	KEP. BANGKA BELITUNG	19078.1	39.65	75644.48
10	KEP. RIAU	118.56	29.96	355.2
11	DKI JAKARTA	513.27	14.79	759.31
12	JAWA BARAT	1470616.28	57.9	8514667.14
13	JAWA TENGAH	1551687.48	56.91	8830154.56
14	DI YOGYAKARTA	97467.3	46.61	454274.19
15	JAWA TIMUR	1616234.53	57.09	9226339.61
16	BANTEN	298835.05	51.01	1524347.86



17	BALI	107225.38	60.43	647966.26
18	NUSA TENGGARA BARAT	280026.66	51.9	1453450.83
19	NUSA TENGGARA TIMUR	167831.69	42.12	706906.05
20	KALIMANTAN BARAT	255109.12	31.36	799992.83
21	KALIMANTAN TENGAH	110804.62	34.13	378178.03
22	KALIMANTAN SELATAN	240644.42	40.7	979359.38
23	KALIMANTAN TIMUR	61939.27	37.02	229275
24	KALIMANTAN UTARA	9412.52	36.37	34234.37
25	SULAWESI UTARA	58875.23	45.06	265295.68
26	SULAWESI TENGAH	171786.2	44.23	759838.42
27	SULAWESI SELATAN	949778.54	50.5	4796679.57
28	SULAWESI TENGGARA	130308.14	42.44	552972.27
29	GORONTALO	46229.66	47.32	218781.2
30	SULAWESI BARAT	64187.41	50.33	323023.96
31	MALUKU	24043.19	37.12	89239.14
32	MALUKU UTARA	11732.75	32.48	38113.47
33	PAPUA BARAT	5145.63	41.51	21360.11
34	PAPUA BARAT DAYA	427.53	30.53	1305.12
35	PAPUA	1113.39	43.58	4852.26
36	PAPUA SELATAN	46736.31	45.7	213578.11
37	PAPUA TENGAH	1457.19	46.78	6816.72
38	PAPUA PEGUNUNGAN	26.68	42.48	113.33
	INDONESIA	10046457.29	52.42	52659237.12

Sumber : BPS Tahun 2024

4.2.7 Capaian Ekspor Pertanian Provinsi Bali dibandingkan Ekspor Pertanian Nasional Tahun 2024.

Ekspor secara langsung dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan ekspor dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan PDRB. Ekspor juga dapat meningkatkan



pendapatan dan produksi suatu daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Perbandingan Nilai ekspor produk pertanian pada periode Januari – November 2024 tercatat naik 22,45% dibandingkan dengan periode sebelumnya dan berkorelasi positif terhadap nilai ekspor nasional secara umum dengan capaian 29,80% meskipun terjadi penurunan realisasi pada bulan sebelumnya.

Tabel 4.8 Realisasi Ekspor Produk Pertanian Tahun 2024

No	Sektor	Jan- Nov 2023	Jan- Nov 2024	Total Ekspor Jan-Nov 2024 (%)
		nilai (US\$)	nilai (US\$)	
1	Eksport Pertanian Nasional	4,400.70	5,712.50	29,80
2	Eksport Pertanian Bali	44,743.14	54,787.76	22.45

Sumber : Berita Statistik BPS Tahun 2024

4.2.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 4.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
BID P3HP		498,784,500	490,428,850	98.32
1	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	498,784,500	490,428,850	98.32
BID KP		6,671,431,860	5,593,732,160	83.85
2	2.0 9.0 4.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	162,888,060	162,040,010	99.48
3	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	6,410,759,820	5,336,734,070	83.25



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
	Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
4	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	97,783,980	94,958,080	97.11
SEKRET		46,711,757,660	43,817,320,788	93.80
5	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	326,317,920	320,886,120	98.34
6	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307,837,560	300,280,515	97.55
7	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42,190,448,420	39,557,416,527	93.76
8	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	350,307,780	340,734,490	97.27
9	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,575,000	11,086,500	81.67
10	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,285,300	41,496,610	79.37
11	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58,000,000	55,980,000	96.52
12	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,400,000	5,040,000	93.33
13	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34,710,000	9,665,863	27.85



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
14	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468,000,000	405,217,883	86.59
15	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318,655,720	315,541,120	99.02
16	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,609,754,960	1,509,806,360	93.79
17	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	771,642,800	770,840,800	99.90
18	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204,822,200	173,328,000	84.62
BID SDP		3,043,105,100	3,032,675,715	99.66
19	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2,690,154,540	2,683,102,200	99.74
20	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	223,704,140	220,567,095	98.60
21	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	129,246,420	129,006,420	99.81
BID TPH		2,092,279,600	2,025,941,213	96.83
22	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2,092,279,600	2,025,941,213	96.83
BID BUN		1,073,624,460	1,070,038,815	99.67



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
23	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1,073,624,460	1,070,038,815	99.67
BID PKH		5,688,694,200	5,543,595,595	97.45
24	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4,218,525,640	4,119,415,770	97.65
25	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,422,286,420	1,376,603,385	96.79
26	3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	47,882,140	47,576,440	99.36
UPTD BSMKP		1,686,239,760	1,553,212,063	92.11
27	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,180,500	3,540,500	84.69
28	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,967,200	10,248,000	68.47
29	2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,884,800	32,320,000	98.28
30	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139,230,000	108,532,141	77.95
31	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	117,988,120	116,922,420	99.10



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
32	2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178,117,290	176,951,080	99.35
33	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80,364,280	80,143,280	99.73
34	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39,340,000	37,045,000	94.17
35	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	385,405,340	339,606,752	88.12
36	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150,079,720	125,144,320	83.39
37	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	268,534,060	259,124,615	96.50
38	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	275,148,450	263,633,955	95.82
UPTD BPSBTPH BUN		1,071,810,800	1,003,090,896	93.59
39	3.27.0 1.1.0 60001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	1,406,400	1,299,000	92.36
40	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,348,200	2,413,900	72.10



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
41	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	24,000,000	96.00
42	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000	66,721,321	66.72
43	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76,056,180	75,976,280	99.89
44	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107,717,140	96,978,440	90.03
45	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,500,000	1,360,000	54.40
46	3.27.0 1.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,500,000	2,450,000	98.00
47	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	368,616,260	368,018,210	99.84
48	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	384,666,620	363,873,745	94.59
UPTD BPTPH BUN		2,735,633,200	2,675,511,365	97.80
49	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,227,000	1,020,000	83.13
50	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,548,200	5,217,400	79.68
51	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik	50,000,000	49,500,000	99.00



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
	Kantor			
52	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239,360,000	215,617,945	90.08
53	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191,776,000	191,322,200	99.76
54	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195,541,420	186,458,820	95.36
55	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	607,914,240	607,454,240	99.92
56	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,910,000	2,895,000	99.48
57	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492,722,460	478,150,370	97.04
58	3.27.05.1.01.000 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim \$DPI% Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	568,756,840	564,108,845	99.18
59	3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	378,877,040	373,766,545	98.65
UPTD BIBD		3,287,941,561	2,933,393,186	89.22



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
60	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,587,400	12,576,250	99.91
61	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,055,736	7,258,500	45.21
62	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,500,000	31,452,550	96.78
63	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,800,000	46,097,350	71.14
64	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274,125,480	272,658,480	99.46
65	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208,647,620	197,040,920	94.44
66	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306,457,120	306,257,640	99.93
67	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,020,000	4,930,000	70.23
68	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2,365,748,205	2,055,121,496	86.87



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
	UPTD BBITPHBUN	5,264,949,300	3,972,705,883	75.46
69	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,575,900	1,421,600	90.21
70	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,674,000	3,414,250	73.05
71	3.27.01.1.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,998,000	24,351,000	81.18
72	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133,400,000	97,614,305	73.17
73	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113,868,820	113,761,420	99.91
74	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127,384,280	124,638,180	97.84
75	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,692,755,140	1,482,413,118	55.05
76	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,500,000	2,400,000	96.00
77	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	685,701,640	664,764,040	96.95



NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	CAPAIAN %
A	B	C	E	D
78	3.27.02.1.02.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	709,591,320	703,181,320	99.10
79	3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	430,102,060	428,460,760	99.62
80	3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	275,398,140	270,148,340	98.09
81	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	58,000,000	56,137,550	96.79
TOTAL		79,826,252,001	73,711,646,529	92.34

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari anggaran yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar Rp. 79.826.252.001,- dengan realisasi Rp. 73.711.646.529,- atau (92,34%) hal ini menunjukkan tingkat serapan anggaran telah melebihi target yang diharapkan dengan estimasi serapan 90%, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

4.2.9 Realisasi Anggaran Tahun 2024


Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali T.A 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp.79.826.252.001,-terrealisasi sebesar Rp.73.711.646.529,- atau 92,29% dengan realisasi fisik mencapai 97,63%.





BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini disusun agar dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi terhadap capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2025-2029. Dengan telah tersusunnya dokumen renstra ini diharapkan semua program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dapat berjalan secara terarah, terukur, sehingga diharapkan pembangunan dibidang pertanian dan ketahanan pangan dapat terlaksana sesuai rencana serta dapat memenuhi harapan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tahun 2025-2029 memerlukan perhatian yang sangat serius dari pimpinan beserta seluruh Tim Penyusun Renstra sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan berhasil sesuai harapan, apabila adanya komitmen yang tinggi khususnya dari seluruh Pimpinan beserta jajarannya tentunya melalui proses koordinasi dan komunikasi pada setiap proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta dalam penetapan indikator kinerja termasuk dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) ini akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 - 2029. Renstra ini disusun menggunakan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder mulai dari mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis,



sehingga dalam pelaksanaan Renja setiap tahun nantinya memerlukan keterlibatan masyarakat dan stakeholder untuk pengawasannya.

Dengan tersusunya dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				980.420.187,00		1.112.442.854,00		1.180.114.639,00		1.267.919.449,00		1.334.225.503,00		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				35.668.265,00		43.426.421,00		49.713.377,00		57.046.829,00		63.831.040,00		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Cadangan Pangan (%)	0	27,54	35.668.265,00	43,48	43.426.421,00	60,87	49.713.377,00	79,71	57.046.829,00	100	63.831.040,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.02.1.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi				35.668.265,00		43.426.421,00		49.713.377,00		57.046.829,00		63.831.040,00		
Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	0	10	35.668.265,00	11	43.426.421,00	12	49.713.377,00	13	57.046.829,00	14	63.831.040,00		
2.09.02.1.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				35.668.265,00		43.426.421,00		49.713.377,00		57.046.829,00		63.831.040,00		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	0	10	35.668.265,00	11	43.426.421,00	12	49.713.377,00	13	57.046.829,00	14	63.831.040,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				221.190.679,00		271.937.378,00		300.773.633,00		337.633.049,00		379.602.874,00		
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Pengembangan Kelompok Pangan Lokal (%)	0	16,40	221.190.679,00	18,40	271.937.378,00	20,06	300.773.633,00	21,73	337.633.049,00	23,41	379.602.874,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				221.190.679,00		271.937.378,00		300.773.633,00		337.633.049,00		379.602.874,00		
Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	1	221.190.679,00	1	271.937.378,00	1	300.773.633,00	1	337.633.049,00	1	379.602.874,00		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.09.03.1.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				60.725.667,00		76.798.233,00		86.120.574,00		96.732.631,00		109.405.894,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	1	60.725.667,00	1	76.798.233,00	1	86.120.574,00	1	96.732.631,00	1	109.405.894,00		
2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				82.959.012,00		101.254.913,00		111.380.404,00		124.518.444,00		139.176.808,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0	1	82.959.012,00	1	101.254.913,00	1	111.380.404,00	1	124.518.444,00	1	139.176.808,00		
2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				77.506.000,00		93.884.232,00		103.272.655,00		116.381.974,00		131.020.172,00		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	0	1	77.506.000,00	1	93.884.232,00	1	103.272.655,00	1	116.381.974,00	1	131.020.172,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				368.163.020,00		407.223.472,00		432.522.451,00		467.990.126,00		487.004.546,00		
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) (Nilai)	92,03	92,50	243.324.091,00	93,01	272.790.376,00	93,34	297.196.811,00	93,67	325.455.011,00	94,00	341.022.107,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				243.324.091,00		272.790.376,00		297.196.811,00		325.455.011,00		341.022.107,00		
Jumlah Dokumen Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	0	1	16.472.599,00	1	20.253.735,00	1	22.279.109,00	1	24.507.020,00	1	26.957.722,00		
2.09.04.1.02.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				16.472.599,00		20.253.735,00		22.279.109,00		24.507.020,00		26.957.722,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	0	1	16.472.599,00	1	20.253.735,00	1	22.279.109,00	1	24.507.020,00	1	26.957.722,00		
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	226.851.492,00	1	252.536.641,00	1	274.917.702,00	1	300.947.991,00	1	314.064.385,00		
2.09.04.1.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				226.851.492,00		252.536.641,00		274.917.702,00		300.947.991,00		314.064.385,00		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	226.851.492,00	1	252.536.641,00	1	274.917.702,00	1	300.947.991,00	1	314.064.385,00		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	3.355	2.420	124.838.929,00	2.430	134.433.096,00	2.440	135.325.640,00	2.450	142.535.115,00	2.460	145.982.439,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
				2026	2027		2028			2029				2030
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi				124.838.929,00		134.433.096,00		135.325.640,00		142.535.115,00		145.982.439,00		
Jumlah Dokumen Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	124.838.929,00	1	134.433.096,00	1	135.325.640,00	1	142.535.115,00	1	145.982.439,00		
2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota				124.838.929,00		134.433.096,00		135.325.640,00		142.535.115,00		145.982.439,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	124.838.929,00	1	134.433.096,00	1	135.325.640,00	1	142.535.115,00	1	145.982.439,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				355.398.223,00		389.855.583,00		397.105.178,00		405.249.445,00		403.787.043,00		
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	16	16	214.151.892,00	16	236.541.434,00	16	240.728.883,00	16	245.460.079,00	16	244.666.185,00	3.27.2.09.0.00.01.00 09 - UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				214.151.892,00		236.541.434,00		240.728.883,00		245.460.079,00		244.666.185,00		
Jumlah produk yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	8	9	214.151.892,00	10	236.541.434,00	11	240.728.883,00	12	245.460.079,00	13	244.666.185,00		
	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	12	13		14		15		16	17				
2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				124.151.892,00		130.041.434,00		132.728.883,00		134.699.476,00		134.199.476,00		
Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	8	9	124.151.892,00	10	130.041.434,00	11	132.728.883,00	12	134.699.476,00	13	134.199.476,00		
2.09.05.1.01.0008 - Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				90.000.000,00		106.500.000,00		108.000.000,00		110.760.603,00		110.466.709,00		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	12	13	90.000.000,00	14	106.500.000,00	15	108.000.000,00	16	110.760.603,00	17	110.466.709,00		
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi (%)	78,40	70,00	141.246.331,00	72,00	153.314.149,00	72,50	156.376.295,00	73,00	159.789.366,00	73,50	159.120.858,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				141.246.331,00		153.314.149,00		156.376.295,00		159.789.366,00		159.120.858,00		
Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji dan Jumlah Registrasi Kebun	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	141.246.331,00	1	153.314.149,00	1	156.376.295,00	1	159.789.366,00	1	159.120.858,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05.1.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				141.246.331,00		153.314.149,00		156.376.295,00		159.789.366,00		159.120.858,00		
terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	141.246.331,00	1	153.314.149,00	1	156.376.295,00	1	159.789.366,00	1	159.120.858,00		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				89.498.234.487,00		96.354.651.778,00		98.496.685.360,00		103.676.140.957,00		107.270.578.060,00		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				61.540.808.110,00		64.099.857.593,00		64.480.303.120,00		67.721.002.207,00		70.191.147.034,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82,64	82,70	61.540.808.110,00	82,75	64.099.857.593,00	82,80	64.480.303.120,00	82,85	67.721.002.207,00	82,90	70.191.147.034,00	3.27.2.09.0.00.01.00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				766.404.446,00		843.044.893,00		843.044.893,00		843.044.893,00		843.044.893,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2	766.404.446,00	2	843.044.893,00	2	843.044.893,00	2	843.044.893,00	2	843.044.893,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				451.634.879,00		496.798.370,00		496.798.370,00		496.798.370,00		496.798.370,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2	451.634.879,00	2	496.798.370,00	2	496.798.370,00	2	496.798.370,00	2	496.798.370,00		
3.27.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				314.769.567,00		346.246.523,00		346.246.523,00		346.246.523,00		346.246.523,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	314.769.567,00	1	346.246.523,00	1	346.246.523,00	1	346.246.523,00	1	346.246.523,00		
3.27.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50.941.956.418,00		52.964.934.945,00		53.215.028.734,00		56.301.038.403,00		58.620.501.558,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	275	520	50.941.956.418,00	520	52.964.934.945,00	520	53.215.028.734,00	520	56.301.038.403,00	520	58.620.501.558,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				50.620.691.320,00		52.611.543.338,00		52.861.637.127,00		55.947.646.796,00		58.267.109.951,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	275	520	50.620.691.320,00	520	52.611.543.338,00	520	52.861.637.127,00	520	55.947.646.796,00	520	58.267.109.951,00		
3.27.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				321.265.098,00		353.391.607,00		353.391.607,00		353.391.607,00		353.391.607,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	321.265.098,00	1	353.391.607,00	1	353.391.607,00	1	353.391.607,00	1	353.391.607,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				423.740.174,00		466.114.191,00		466.114.191,00		466.114.191,00		466.114.191,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	423.740.174,00	2	466.114.191,00	2	466.114.191,00	2	466.114.191,00	2	466.114.191,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	3		3		3		3					
3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.189.300,00		23.308.230,00		23.308.230,00		23.308.230,00		23.308.230,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	21.189.300,00	1	23.308.230,00	1	23.308.230,00	1	23.308.230,00	1	23.308.230,00		
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				234.100.834,00		257.510.917,00		257.510.917,00		257.510.917,00		257.510.917,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	234.100.834,00	2	257.510.917,00	2	257.510.917,00	2	257.510.917,00	2	257.510.917,00		
3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				73.703.740,00		81.074.114,00		81.074.114,00		81.074.114,00		81.074.114,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	73.703.740,00	2	81.074.114,00	2	81.074.114,00	2	81.074.114,00	2	81.074.114,00		
3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94.746.300,00		104.220.930,00		104.220.930,00		104.220.930,00		104.220.930,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	3	94.746.300,00	3	104.220.930,00	3	104.220.930,00	3	104.220.930,00	3	104.220.930,00		
3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				784.420.628,00		862.862.690,00		862.862.690,00		862.862.690,00		862.862.690,00		
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	784.420.628,00	12	862.862.690,00	12	862.862.690,00	12	862.862.690,00	12	862.862.690,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12							
3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				458.700.000,00		504.570.000,00		504.570.000,00		504.570.000,00		504.570.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	458.700.000,00	12	504.570.000,00	12	504.570.000,00	12	504.570.000,00	12	504.570.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				325.720.628,00		358.292.690,00		358.292.690,00		358.292.690,00		358.292.690,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	325.720.628,00	12	358.292.690,00	12	358.292.690,00	12	358.292.690,00	12	358.292.690,00		
3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.045.628.504,00		5.250.191.354,00		5.250.191.354,00		5.250.191.354,00		5.250.191.354,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	59	5.045.628.504,00	61	5.250.191.354,00	62	5.250.191.354,00	63	5.250.191.354,00	65	5.250.191.354,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	4		4		4		4					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	58	57		57		57		57		57			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	380	35		37		37		38		38			
3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3.030.427.104,00		3.033.469.814,00		3.033.469.814,00		3.033.469.814,00		3.033.469.814,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	58	57	3.030.427.104,00	57	3.033.469.814,00	57	3.033.469.814,00	57	3.033.469.814,00	57	3.033.469.814,00		
3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.440.000,00		109.384.000,00		109.384.000,00		109.384.000,00		109.384.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	59	99.440.000,00	61	109.384.000,00	62	109.384.000,00	63	109.384.000,00	65	109.384.000,00		
3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.816.321.400,00		1.997.953.540,00		1.997.953.540,00		1.997.953.540,00		1.997.953.540,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	4	1.816.321.400,00	4	1.997.953.540,00	4	1.997.953.540,00	4	1.997.953.540,00	4	1.997.953.540,00		
3.27.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				99.440.000,00		109.384.000,00		109.384.000,00		109.384.000,00		109.384.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	380	35	99.440.000,00	37	109.384.000,00	37	109.384.000,00	38	109.384.000,00	38	109.384.000,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82,64	82,70	61.540.808.110,00	82,75	64.099.857.593,00	82,80	64.480.303.120,00	82,85	67.721.002.207,00	82,90	70.191.147.034,00	3.27.2.09.0.00.01.00 09 - UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				89.007.660,00		89.007.660,00		96.507.660,00		96.507.660,00		96.507.660,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	89.007.660,00	1	89.007.660,00	1	96.507.660,00	1	96.507.660,00	1	96.507.660,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.927.800,00		3.927.800,00		3.927.800,00		3.927.800,00		3.927.800,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.927.800,00	1	3.927.800,00	1	3.927.800,00	1	3.927.800,00	1	3.927.800,00		
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.579.860,00		52.579.860,00		60.079.860,00		60.079.860,00		60.079.860,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	52.579.860,00	1	52.579.860,00	1	60.079.860,00	1	60.079.860,00	1	60.079.860,00		
3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00		
3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				231.951.230,00		231.951.230,00		231.951.230,00		251.051.230,00		251.051.230,00		
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	231.951.230,00	12	231.951.230,00	12	231.951.230,00	12	251.051.230,00	12	251.051.230,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.230.000,00		127.230.000,00		127.230.000,00		146.330.000,00		146.330.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	127.230.000,00	12	127.230.000,00	12	127.230.000,00	12	146.330.000,00	12	146.330.000,00		
3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				104.721.230,00		104.721.230,00		104.721.230,00		104.721.230,00		104.721.230,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	104.721.230,00	12	104.721.230,00	12	104.721.230,00	12	104.721.230,00	12	104.721.230,00		
3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363.556.554,00		379.406.554,00		379.406.554,00		379.406.554,00		396.406.554,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	363.556.554,00	7	379.406.554,00	7	379.406.554,00	7	379.406.554,00	7	396.406.554,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				398.840.332,00		398.840.332,00		398.840.332,00		398.840.332,00		440.104.712,00		
Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	398.840.332,00	12	398.840.332,00	12	398.840.332,00	12	398.840.332,00	12	440.104.712,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.520.000,00		220.520.000,00		220.520.000,00		220.520.000,00		261.784.380,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	220.520.000,00	12	220.520.000,00	12	220.520.000,00	12	220.520.000,00	12	261.784.380,00		
3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				178.320.332,00		178.320.332,00		178.320.332,00		178.320.332,00		178.320.332,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	178.320.332,00	12	178.320.332,00	12	178.320.332,00	12	178.320.332,00	12	178.320.332,00		
3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				559.354.264,00		594.882.874,00		632.144.345,00		651.311.963,00		651.311.963,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	55	559.354.264,00	57	594.882.874,00	59	632.144.345,00	61	651.311.963,00	63	651.311.963,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	78	65		65		65		65		65			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				232.277.312,00		232.277.312,00		269.538.783,00		269.538.783,00		269.538.783,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	78	65	232.277.312,00	65	232.277.312,00	65	269.538.783,00	65	269.538.783,00	65	269.538.783,00		
3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.200.000,00		5.200.000,00		5.200.000,00		24.367.618,00		24.367.618,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	55	5.200.000,00	57	5.200.000,00	59	5.200.000,00	61	24.367.618,00	63	24.367.618,00		
3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				321.876.952,00		357.405.562,00		357.405.562,00		357.405.562,00		357.405.562,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	321.876.952,00	5	357.405.562,00	5	357.405.562,00	5	357.405.562,00	5	357.405.562,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.517.030,00		3.517.030,00		4.517.030,00		4.517.030,00		4.517.030,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.517.030,00	1	3.517.030,00	1	4.517.030,00	1	4.517.030,00	1	4.517.030,00		
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.996.120,00		36.769.090,00		41.769.090,00		68.684.390,00		80.291.207,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	17.996.120,00	3	36.769.090,00	3	41.769.090,00	3	68.684.390,00	3	80.291.207,00		
3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.750.000,00		35.750.000,00		35.750.000,00		35.750.000,00		35.750.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.750.000,00	1	35.750.000,00	1	35.750.000,00	1	35.750.000,00	1	35.750.000,00		
3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227.901.322,00		227.901.322,00		231.901.322,00		231.901.322,00		231.901.322,00		
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	227.901.322,00	12	227.901.322,00	12	231.901.322,00	12	231.901.322,00	12	231.901.322,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.619.900,00		148.619.900,00		152.619.900,00		152.619.900,00		152.619.900,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	148.619.900,00	12	148.619.900,00	12	152.619.900,00	12	152.619.900,00	12	152.619.900,00		
3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				79.281.422,00		79.281.422,00		79.281.422,00		79.281.422,00		79.281.422,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	79.281.422,00	12	79.281.422,00	12	79.281.422,00	12	79.281.422,00	12	79.281.422,00		
3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				222.764.704,00		242.764.704,00		275.414.971,00		295.414.971,00		335.414.971,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	55	222.764.704,00	55	242.764.704,00	55	275.414.971,00	55	295.414.971,00	55	335.414.971,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	25		25		25		25					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8		8		8		8					
3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				167.784.704,00		167.784.704,00		180.434.971,00		190.434.971,00		200.434.971,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	25	167.784.704,00	25	167.784.704,00	25	180.434.971,00	25	190.434.971,00	25	200.434.971,00		
3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.035.000,00		33.035.000,00		43.035.000,00		43.035.000,00		43.035.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	55	23.035.000,00	55	33.035.000,00	55	43.035.000,00	55	43.035.000,00	55	43.035.000,00		
3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				31.945.000,00		41.945.000,00		51.945.000,00		61.945.000,00		91.945.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	31.945.000,00	8	41.945.000,00	8	51.945.000,00	8	61.945.000,00	8	91.945.000,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82,64	82,70	61.540.808.110,00	82,75	64.099.857.593,00	82,80	64.480.303.120,00	82,85	67.721.002.207,00	82,90	70.191.147.034,00	3.27.2.09.0.00.01.00 15 - UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				59.364.055,00		69.364.055,00		79.364.055,00		70.364.055,00		108.674.530,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	59.364.055,00	1	69.364.055,00	1	79.364.055,00	1	70.364.055,00	1	108.674.530,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.996.900,00		1.996.900,00		2.996.900,00		2.996.900,00		2.996.900,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.996.900,00	1	1.996.900,00	1	2.996.900,00	1	2.996.900,00	1	2.996.900,00		
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.367.155,00		32.367.155,00		41.367.155,00		32.367.155,00		70.677.630,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	22.367.155,00	1	32.367.155,00	1	41.367.155,00	1	32.367.155,00	1	70.677.630,00		
3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				225.911.503,00		236.311.503,00		236.311.503,00		236.311.503,00		236.311.503,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	225.911.503,00	12	236.311.503,00	12	236.311.503,00	12	236.311.503,00	12	236.311.503,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.912.191,00		128.312.191,00		128.312.191,00		128.312.191,00		128.312.191,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	117.912.191,00	12	128.312.191,00	12	128.312.191,00	12	128.312.191,00	12	128.312.191,00		
3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				107.999.312,00		107.999.312,00		107.999.312,00		107.999.312,00		107.999.312,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	107.999.312,00	12	107.999.312,00	12	107.999.312,00	12	107.999.312,00	12	107.999.312,00		
3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				151.056.902,00		166.056.902,00		196.766.902,00		252.583.402,00		252.583.402,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	9	151.056.902,00	9	166.056.902,00	9	196.766.902,00	9	252.583.402,00	9	252.583.402,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	28		28		28		28		28			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	4		4		4		4		4			
3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				85.570.410,00		95.570.410,00		95.570.410,00		104.570.410,00		104.570.410,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	28	85.570.410,00	28	95.570.410,00	28	95.570.410,00	28	104.570.410,00	28	104.570.410,00		
3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.920.000,00		17.920.000,00		27.920.000,00		27.920.000,00		27.920.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	9	12.920.000,00	9	17.920.000,00	9	27.920.000,00	9	27.920.000,00	9	27.920.000,00		
3.27.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.566.492,00		52.566.492,00		73.276.492,00		120.092.992,00		120.092.992,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	4	52.566.492,00	4	52.566.492,00	4	73.276.492,00	4	120.092.992,00	4	120.092.992,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				19.050.289.532,00		22.337.154.916,00		23.639.615.593,00		25.064.993.665,00		25.930.629.564,00		
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (%)	0,60	0,70	1.201.836.292,00	0,75	1.378.469.857,00	0,80	1.480.440.488,00	0,85	1.600.950.286,00	0,90	1.688.626.295,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	0,60	0,75		0,80		0,85		0,90		0,95			
	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian (%)	90	90		90		90		90		90			
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	2,63	3,70		3,80		3,90		4,00		4,10			
	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (%)	0,60	0,75		0,80		0,85		0,90		0,95			
3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				11.474.911.144,00		12.903.766.897,00		13.596.921.099,00		14.317.729.605,00		14.660.726.534,00		
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3	2	11.474.911.144,00	2	12.903.766.897,00	2	13.596.921.099,00	2	14.317.729.605,00	2	14.660.726.534,00		
3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				11.474.911.144,00		12.903.766.897,00		13.596.921.099,00		14.317.729.605,00		14.660.726.534,00		
Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3	2	11.474.911.144,00	2	12.903.766.897,00	2	13.596.921.099,00	2	14.317.729.605,00	2	14.660.726.534,00		
3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				1.937.107.326,00		2.995.511.942,00		3.277.085.904,00		3.709.992.519,00		3.862.511.187,00		
Jumlah Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	844.752.178,00	1	1.356.641.461,00	1	1.496.200.598,00	1	1.711.624.887,00	1	1.796.448.417,00		
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan				844.752.178,00		1.356.641.461,00		1.496.200.598,00		1.711.624.887,00		1.796.448.417,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	844.752.178,00	1	1.356.641.461,00	1	1.496.200.598,00	1	1.711.624.887,00	1	1.796.448.417,00		
3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura				612.222.164,00		1.138.737.497,00		1.260.752.322,00		1.458.234.648,00		1.505.929.786,00		
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	612.222.164,00	1	1.138.737.497,00	1	1.260.752.322,00	1	1.458.234.648,00	1	1.505.929.786,00		
3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan				480.132.984,00		500.132.984,00		520.132.984,00		540.132.984,00		560.132.984,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	480.132.984,00	1	500.132.984,00	1	520.132.984,00	1	540.132.984,00	1	560.132.984,00		
3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.042.362.110,00		2.504.459.540,00		2.576.700.000,00		2.585.066.492,00		2.662.548.961,00		
Meningkatnya populasi ternak unggulan daerah	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3	3	2.042.362.110,00	3	2.504.459.540,00	3	2.576.700.000,00	3	2.585.066.492,00	3	2.662.548.961,00		
3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.042.362.110,00		2.504.459.540,00		2.576.700.000,00		2.585.066.492,00		2.662.548.961,00		
Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3	3	2.042.362.110,00	3	2.504.459.540,00	3	2.576.700.000,00	3	2.585.066.492,00	3	2.662.548.961,00		
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian				0		0		0		0		0	3.27.2.09.0.00.01.00 11 - UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	2,63	3,70		3,80		3,90		4,00		4,10		3.27.2.09.0.00.01.00 13 - UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.685.066.492,00		1.771.066.492,00		1.856.066.492,00		1.905.639.589,00		2.006.066.492,00		
Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	3	3	1.685.066.492,00	3	1.771.066.492,00	3	1.856.066.492,00	3	1.905.639.589,00	3	2.006.066.492,00		
3.27.02.1.04.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.685.066.492,00		1.771.066.492,00		1.856.066.492,00		1.905.639.589,00		2.006.066.492,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	3	3	1.685.066.492,00	3	1.771.066.492,00	3	1.856.066.492,00	3	1.905.639.589,00	3	2.006.066.492,00		
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (%)	0,60	0,70	1.201.836.292,00	0,75	1.378.469.857,00	0,80	1.480.440.488,00	0,85	1.600.950.286,00	0,90	1.688.626.295,00	3.27.2.09.0.00.01.00 14 - UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (%)	0,60	0,75		0,80		0,85		0,90		0,95			
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	0,60	0,75		0,80		0,85		0,90		0,95			
3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				296.132.984,00		317.732.984,00		317.732.984,00		341.492.984,00		367.628.984,00		
Tercapainya Pengawasan Mutu dan Peredaran serta Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	24	24	152.132.984,00	24	159.332.984,00	24	159.332.984,00	24	167.252.984,00	24	175.964.984,00		
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	75	80		81		82		83		84			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		
Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	75	80	20.000.000,00	81	25.000.000,00	82	25.000.000,00	83	27.000.000,00	84	30.000.000,00		
3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan				72.000.000,00		79.200.000,00		79.200.000,00		87.120.000,00		95.832.000,00		
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	24	24	72.000.000,00	24	79.200.000,00	24	79.200.000,00	24	87.120.000,00	24	95.832.000,00		
3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura				132.132.984,00		134.332.984,00		134.332.984,00		140.252.984,00		145.964.984,00		
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	24	24	132.132.984,00	24	134.332.984,00	24	134.332.984,00	24	140.252.984,00	24	145.964.984,00		
3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan				72.000.000,00		79.200.000,00		79.200.000,00		87.120.000,00		95.832.000,00		
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	72.000.000,00	1	79.200.000,00	1	79.200.000,00	1	87.120.000,00	1	95.832.000,00		
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	0,60	0,75	1.083.558.870,00	0,80	1.615.322.173,00	0,85	1.768.822.732,00	0,90	2.007.502.585,00	0,95	2.117.907.236,00	3.27.2.09.0.00.01.00 15 - UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (%)	0,60	0,75		0,80		0,85		0,90		0,95			
	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (%)	0,60	0,70		0,75		0,80		0,85		0,90			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				1.564.709.476,00		1.774.617.061,00		1.915.109.114,00		2.085.072.476,00		2.221.147.406,00		
Jumlah Laporan Perbanyak Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	0,75	1,25	798.199.476,00	1,50	865.999.476,00	1,75	940.579.476,00	2,00	1.022.617.476,00	2,25	1.112.859.276,00		
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3	15		15		15		15		15			
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	900.000	500.000		550.000		560.000		570.000		590.000			
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	44.000	50.000		52.000		54.000		56.000		58.000			
3.27.02.1.02.0007 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				459.199.476,00		493.099.476,00		530.389.476,00		571.408.476,00		616.529.376,00		
Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	44.000	50.000	459.199.476,00	52.000	493.099.476,00	54.000	530.389.476,00	56.000	571.408.476,00	58.000	616.529.376,00		
3.27.02.1.02.0011 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				599.703.308,00		729.136.873,00		781.107.504,00		853.697.302,00		882.661.311,00		
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	900.000	500.000	599.703.308,00	550.000	729.136.873,00	560.000	781.107.504,00	570.000	853.697.302,00	590.000	882.661.311,00		
3.27.02.1.02.0013 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				166.806.692,00		179.480.712,00		193.422.134,00		208.757.698,00		225.626.819,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3	15	166.806.692,00	15	179.480.712,00	15	193.422.134,00	15	208.757.698,00	15	225.626.819,00		
3.27.02.1.02.0014 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi				339.000.000,00		372.900.000,00		410.190.000,00		451.209.000,00		496.329.900,00		
Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	0,75	1,25	339.000.000,00	1,50	372.900.000,00	1,75	410.190.000,00	2,00	451.209.000,00	2,25	496.329.900,00		
3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		
Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				274.778.681,00		318.007.147,00		339.867.707,00		369.890.996,00		397.120.766,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Prasarana Pertanian (%)	15	16	274.778.681,00	17	318.007.147,00	18	339.867.707,00	19	369.890.996,00	20	397.120.766,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian				274.778.681,00		318.007.147,00		339.867.707,00		369.890.996,00		397.120.766,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1	174.778.681,00	1	201.207.147,00	1	215.887.707,00	1	235.012.996,00	1	253.254.966,00		
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				100.000.000,00		116.800.000,00		123.980.000,00		134.878.000,00		143.865.800,00		
Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	116.800.000,00	1	123.980.000,00	1	134.878.000,00	1	143.865.800,00		
3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				74.778.681,00		84.407.147,00		91.907.707,00		100.134.996,00		109.389.166,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	74.778.681,00	1	84.407.147,00	1	91.907.707,00	1	100.134.996,00	1	109.389.166,00		
Terfasilitasinya Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	121,1	100.000.000,00	159	116.800.000,00	265,45	123.980.000,00	359	134.878.000,00	439	143.865.800,00		
3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				100.000.000,00		116.800.000,00		123.980.000,00		134.878.000,00		143.865.800,00		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	121,1	100.000.000,00	159	116.800.000,00	265,45	123.980.000,00	359	134.878.000,00	439	143.865.800,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				8.324.696.207,00		9.246.758.254,00		9.656.650.352,00		10.109.769.485,00		10.319.778.645,00		
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (%)	68,72	70,92	8.160.622.186,00	72,04	9.067.010.631,00	73,16	9.472.457.120,00	74,28	9.919.972.726,00	75,40	10.130.001.475,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				8.060.622.186,00		8.942.010.631,00		9.342.457.120,00		9.769.972.726,00		9.950.001.475,00		
Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	2	2	8.060.622.186,00	2	8.942.010.631,00	2	9.342.457.120,00	2	9.769.972.726,00	2	9.950.001.475,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.1.01.0007 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				8.060.622.186,00		8.942.010.631,00		9.342.457.120,00		9.769.972.726,00		9.950.001.475,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	2	2	8.060.622.186,00	2	8.942.010.631,00	2	9.342.457.120,00	2	9.769.972.726,00	2	9.950.001.475,00		
3.27.04.1.05 - Kesejahteraan Hewan				100.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		
Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	3	3	100.000.000,00	3	125.000.000,00	3	130.000.000,00	3	150.000.000,00	3	180.000.000,00		
3.27.04.1.05.0002 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya				100.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		
Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	3	3	100.000.000,00	3	125.000.000,00	3	130.000.000,00	3	150.000.000,00	3	180.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan (%)	4,30	4,47	164.074.021,00	4,64	179.747.623,00	4,81	184.193.232,00	4,98	189.796.759,00	5,16	189.777.170,00	3.27.2.09.0.00.01.00 09 - UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	
3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan				164.074.021,00		179.747.623,00		184.193.232,00		189.796.759,00		189.777.170,00		
Jumlah Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi (Unit)	75	78	164.074.021,00	81	179.747.623,00	84	184.193.232,00	87	189.796.759,00	90	189.777.170,00		
	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	75	78		81		84		87		90			
3.27.04.1.03.0001 - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				80.074.021,00		89.000.000,00		92.500.000,00		96.500.000,00		96.490.000,00		
Terpenuhinya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi (Unit)	75	78	80.074.021,00	81	89.000.000,00	84	92.500.000,00	87	96.500.000,00	90	96.490.000,00		
3.27.04.1.03.0003 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				84.000.000,00		90.747.623,00		91.693.232,00		93.296.759,00		93.287.170,00		
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	75	78	84.000.000,00	81	90.747.623,00	84	91.693.232,00	87	93.296.759,00	90	93.287.170,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				270.866.574,00		306.366.059,00		326.434.092,00		349.284.527,00		365.056.692,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	82,91	82,91	270.866.574,00	82,92	306.366.059,00	82,93	326.434.092,00	82,94	349.284.527,00	82,95	365.056.692,00	3.27.2.09.0.00.01.00 12 - UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				270.866.574,00		306.366.059,00		326.434.092,00		349.284.527,00		365.056.692,00		
-Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) -Terpantau dan Terujinya Pengendalian OPT di Bawah Batas Maksimun Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asai Tumbuhan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	2	3	270.866.574,00	4	306.366.059,00	5	326.434.092,00	6	349.284.527,00	7	365.056.692,00		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	4	6		8		10		12		14			
	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				190.000.000,00		213.000.000,00		229.300.000,00		247.730.000,00		253.503.000,00		
Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	4	6	190.000.000,00	8	213.000.000,00	10	229.300.000,00	12	247.730.000,00	14	253.503.000,00		
3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				40.000.000,00		46.000.000,00		48.100.000,00		49.910.000,00		54.901.000,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	2	3	40.000.000,00	4	46.000.000,00	5	48.100.000,00	6	49.910.000,00	7	54.901.000,00		
3.27.05.1.01.0005 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				40.866.574,00		47.366.059,00		49.034.092,00		51.644.527,00		56.652.692,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	1	40.866.574,00	1	47.366.059,00	1	49.034.092,00	1	51.644.527,00	1	56.652.692,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				36.795.383,00		46.507.809,00		53.814.496,00		61.200.077,00		66.845.359,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Pertanian yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (%)	40	20	36.795.383,00	40	46.507.809,00	60	53.814.496,00	80	61.200.077,00	100	66.845.359,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				36.795.383,00		46.507.809,00		53.814.496,00		61.200.077,00		66.845.359,00		
Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	102	102	36.795.383,00	102	46.507.809,00	102	53.814.496,00	102	61.200.077,00	102	66.845.359,00		
3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				36.795.383,00		46.507.809,00		53.814.496,00		61.200.077,00		66.845.359,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	102	102	36.795.383,00	102	46.507.809,00	102	53.814.496,00	102	61.200.077,00	102	66.845.359,00		